



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kyai Mugni Nomor 1018-A Demak Kode Pos 59511

Telepon (0291) 681773 Faksimile (0291) 685664

Pos-el : bakesbangpol@demakkab.go.id, Laman : bakesbangpol.demakkab.go.id

Demak, 18 Januari 2024

Nomor : 050/ 0065
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Pengiriman Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun
2023

Kepada :
Yth. Kepala Inspektur Daerah
Kabupaten Demak

di –

Tempat

Bersama ini dengan hormat kami kirimkan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Demak.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan
sebagaimana semestinya.

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN DEMAK


KENDARSIH IRIANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19700708 199503 2 003

Tembusan : Dikirim kepada Yth ;

1. Bupati Demak (sebagai laporan);
2. Kepala Bagian Organisasi
3. Pertinggal;



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN DEMAK**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Demak, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan



nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Peraturan tersebut mendinklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Umum bidang Kesatuan Bangsa. setelah terbitnya Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa Urusan Pemerintahan Umum diselenggarakan oleh Presiden namun belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut, sehingga diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 adalah untuk memberi kepastian hukum penyelenggaraan urusan Pemerintahan di daerah.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas dan kewajiban :

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Daerah

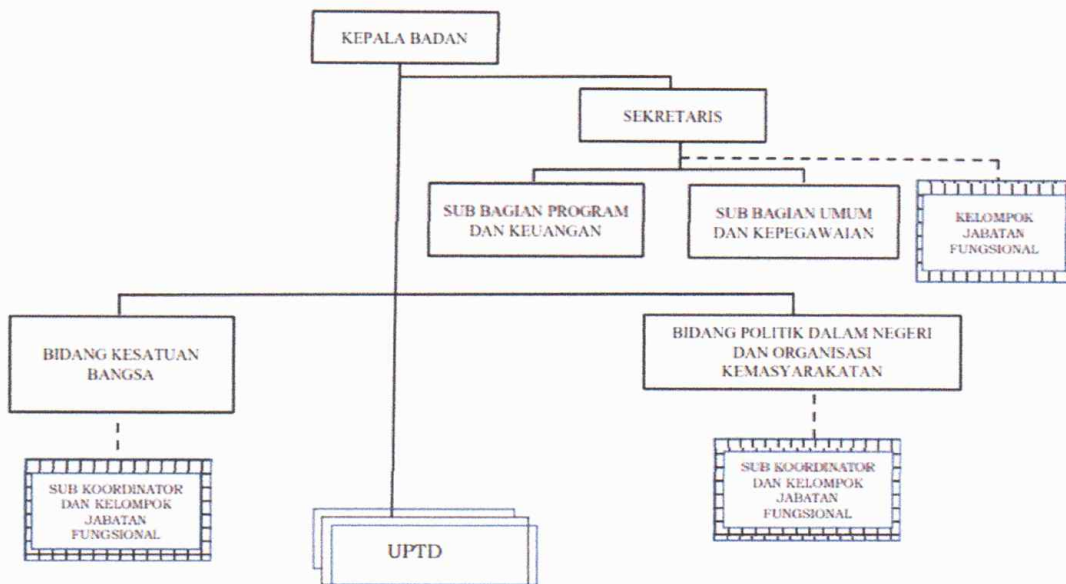
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa serta Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa serta Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
3. Pelaksanaan koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa serta Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Kesatuan Bangsa serta Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
5. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan
6. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh KENDARSIH IRIANI, SH, MH yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN DEMAK



D. Isu Strategis

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan berupaya mewujudkan kondusifitas wilayah Kabupaten Demak tetap kondusif atau aman. Untuk mewujudkan hal tersebut ada beberapa isu strategis yang masih perlu dilakukan upaya peningkatan yaitu :

1. Kurang optimalnya pencapaian sasaran strategis Badan Kesbangpol
2. Kurang optimalnya pelayanan publik Badan Kesbangpol
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat bidang kesatuan bangsa
4. Menurunnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kerukunan Antar Umat Beragama
5. Masih rendahnya pemahaman masyarakat bidang politik

E. Landasan Hukum

LKIP Kabupaten Demak ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Demak Kabupaten Demak Tahun 2023 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026, dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026 menjadi salah satunya. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati Demak terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021 - 2026.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021 - 2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten



Demak merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak

Visi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Demak yang menjadi Visi bersama seluruh Perangkat Daerah, Visi Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2021 - 2026 adalah :

Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera

Kabupaten Demak yang Bermartabat, martabat merupakan hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis. Martabat merupakan konsep yang penting dalam bidang moralitas, etika, hukum dan politik. Bermartabat dimaknai sebagai sikap yang berwibawa yang harus dimiliki dalam menjalankan reformasi birokrasi.

Kabupaten Demak yang Maju, Maju dapat menyatakan suatu tindakan keberadaan, dan pengalaman. Maju dimaknai dengan berada pada tingkat peradaban yang tinggi, yang dimaksud adalah para manusia. Hal ini dimaksudkan bahwa sumber daya manusia telah berkembang pikirannya.

Kabupaten Demak yang Sejahtera, Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Demak yang semakin membaik terutama pada sektor ekonomi.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut telah dituangkan dalam 3 (tiga) misi, yaitu sebagai berikut :

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Dan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing.
3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan Dan Pengangguran.

Badan Kesbangpol Kabupaten Demak mengemban Misi ke-1 yaitu "Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya". Dan Misi ke-3 yaitu "Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan Dan Pengangguran" dengan tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah guna peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditandai dengan nilai investasi daerah meningkat, hal itu dapat dicapai apabila kondusivitas wilayah tetap kondusif dan terjaga yang ditandai dengan tidak adanya konflik di masyarakat baik sosial maupun agama. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengemban fungsi urusan Pemerintahan umum di daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 'salah satu tugasnya turut serta menciptakan kondusifitas wilayah, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2021 - 2026 sebanyak 4 sasaran strategis.



Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan pelayanan publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya capaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mencapai target	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan kondusivitas wilayah	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kerukunan antar umat beragama	Kasus konflik antar/intra umat beragama	0	0	0	0	0
		Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan kesatuan bangsa	Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik	74,5	76,08	78,10	79,68	81,68
			Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa	79,3	81,2	82,8	84,2	86

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Demak telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Demak Nomor : 1



Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Demak dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2021 - 2026

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2023

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan pelayanan publik Badan Kesbangpol	Indeks Kepuasan Masyarakat	%		Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017	Badan Kesbangpol
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	salah satu wujud partisipasi dan kritik masyarakat terhadap kinerja pelayanan pemerintah adalah melalui keluhan masyarakat yang masuk atau disampaikan, sehingga perlu segera ditindaklanjuti agar kinerja pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat dan lebih baik.	jumlah keluhan masyarakat yang masuk atau diterima dan ditindaklanjuti dibagi jumlah keluhan masyarakat yang masuk atau diterima keseluruhan dikali seratus	Badan Kesbangpol
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol	%		nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun evaluasi	
4	Meningkatnya capaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan	%	target kinerja strategis yang telah ditetapkan sudah seharusnya menjadi komitmen bersama untuk	jumlah indikator kinerja yang mencapai target sesuai ketentuan dibagi jumlah total indikator kinerja	Laporan Pengukuran Kinerja Badan Kesbangpol



NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
		Politik yang mencapai target		pencapaiannya, berusaha memperbaiki yang masih kurang dan meningkatkan persentase indikator kinerja yang mencapai target	Badan Kesbangpol	
5	Meningkatnya kondusifitas wilayah	Angka Kejadian Konflik Sosial	Kejadian		Menunjukkan kejadian konflik sosial yang terjadi pada tahun n. Angka 0 (nol) menunjukkan tidak ada kejadian konflik, kejadian 1 s.d lebih dari 1 menunjukkan ada kejadian konflik	Laporan Evaluasi Penanganan Konflik Sosial
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kerukunan antar umat beragama	Kasus konflik antar/intra umat beragama	Kejadian	persoalan agama apabila tidak dikelola dengan baik dapat memicu konflik antar umat beragama, cost penanganan pasca konflik akan sangat besar.	mengitung jumlah kasus konflik antar/intra umat beragama pada tahun berjalan di Kabupaten Demak	Laporan Evaluasi Penanganan Konflik Sosial
7	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan kesatuan bangsa	Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik	%	istilah Politik seringkali dipahami masyarakat merupakan pelaksanaan pemilu dan pilkada, perlu peningkatan pemahaman masyarakat terhadap politik	Merupakan hasil survey yang dilaksanakan kepada masyarakat tentang pemahaman bidangpolitik yang berumur diatas 17 tahun	Hasil Survey Bidang Politik
		Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa	%	kondusifitas wilayah menjadi barometer dalam pemba-ngunan, peningkatan pemahaman bidang kesatuan bangsa akan meminimalisir terjadinya konflik	Merupakan hasil survey yang dilaksanakan kepada masya-rakat tentang pemahaman bidang kesatuan bangsa	Hasil Survey Bidang Kesatuan Bangsa



C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2021 - 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak
Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan pelayanan publik Badan Kesbangpol	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,5
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol	79,18
4	Meningkatnya capaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mencapai target	100
5	Meningkatnya kondusifitas wilayah	Angka Kejadian Konflik Sosial	0
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kerukunan antar umat beragama	Kasus konflik antar/intra umat beragama	0
7	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan kesatuan bangsa	Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik	76,08
		Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa	81,2



1.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Demak juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Demak. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2023, sebagai berikut :

A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2023.

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2023 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan pelayanan publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88,2	89,5	90,8	92	93,5
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2022	2023	2024	2025	2026
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Nilai SAKIP Badan Kesbangpol	%	78,62	79,18	80,07	81,74	82,41
		Meningkatnya capaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mencapai target	%	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan kondusivitas wilayah	Angka Kejadian Konflik Sosial		Kejadian	0	0	0	0	0
		Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kerukunan antar umat beragama	Kasus konflik antar/intra umat beragama	Kejadian	0	0	0	0	0
		Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan kesatuan bangsa	Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik	%	74,5	76,08	78,10	79,68	81,68
			Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa	%	79,3	81,2	82,8	84,2	86

B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	salah satu wujud partisipasi dan kritik masyarakat terhadap kinerja pelayanan pemerintah adalah melalui keluhan masyarakat yang masuk atau disampaikan, sehingga perlu segera ditindaklanjuti agar kinerja pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat dan lebih baik.	jumlah keluhan masyarakat yang masuk atau diterima dan ditindaklanjuti dibagi jumlah keluhan masyarakat yang masuk atau diterima keseluruhan dikali seratus		Badan Kesbangpol
2	Meningkatnya capaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mencapai target	%	target kinerja strategis yang telah ditetapkan sudah seharusnya menjadi komitmen bersama untuk pencapaiannya, berusaha memperbaiki yang masih kurang dan meningkatkan persentase indikator kinerja yang mencapai target	jumlah indikator kinerja yang mencapai target sesuai ketentuan dibagi jumlah total indikator kinerja Badan Kesbangpol		Laporan Pengukuran Kinerja Badan Kesbangpol



Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

3	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kerukunan antar umat beragama	Kasus konflik antar/intra umat beragama	Kejadian	persoalan agama apabila tidak dikelola dengan baik dapat memicu konflik antar umat beragama, cost penanganan pasca konflik akan sangat besar.	mengitung jumlah kasus konflik antar/intra umat beragama pada tahun berjalan di Kabupaten Demak		Laporan Evaluasi Penanganan Konflik Sosial
4	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan kesatuan bangsa	Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik	%	istilah Politik seringkali dipahami masyarakat merupakan pelaksanaan pemilu dan pilkada, perlu peningkatan pemahaman masyarakat terhadap politik	Merupakan hasil survey yang dilaksanakan kepada masyarakat tentang pemahaman bidang politik yang berumur diatas 17 tahun		Hasil Survey Bidang Politik
		Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa	%	kondusifitas wilayah menjadi barometer dalam pembangunan, peningkatan pemahaman bidang kesatuan bangsa akan meminimalisir terjadinya konflik	Merupakan hasil survey yang dilaksanakan kepada masyarakat tentang pemahaman bidang kesatuan bangsa		Hasil Survey Bidang Kesatuan Bangsa



C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Badan Kesbangpol dengan Bupati Demak dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan pelayanan publik Badan Kesbangpol	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	89,5
	Terwujudnya Pelayanan Publik yang <i>responsif</i>	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol	%	79,18
	Meningkatnya capaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mencapai target	%	100
3	Meningkatnya kondusifitas wilayah	Angka Kejadian Konflik Sosial	Kejadian	0
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kerukunan antar umat beragama	Kasus konflik antar/intra umat beragama	Kejadian	0
4	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan kesatuan bangsa	Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik	%	76,08
		Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa	%	81,2

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.



Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten
Demak
Tahun 2023**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2023, hasil reuiu dan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik berdasarkan Keputusan Kepala



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak Nomor : 050/004 Tahun 2023 telah ditetapkan sebanyak 3 Tujuan, 4 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- 3 Tujuan terdiri dari 3 Indikator
- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 050/004 Tahun 2023 tanggal 3 Januari 2023. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak tahun 2023 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	89,5	89,53	100
2	Persentase keluhan masyarakat	%	100	100	100.00



	yang ditindaklanjuti				
3	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol	%	79,18	78,21	98,77
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mencapai target	%	100	100	100.00
5	Angka Kejadian Konflik Sosial	Kejadian	0	0	100.00
6	Kasus konflik antar/intra umat beragama	Kejadian	0	0	100.00
7	Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik	%	76,08	77,06	101.00
8	Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa	%	81,2	82	100.00

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik, dengan capaian kinerja 101%.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti, dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mencapai target, dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Kasus konflik antar/intra umat beragama, dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa, dengan capaian kinerja 100 %.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021 - 2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2021 - 2026 sebanyak 4 sasaran.

Tahun 2023 adalah tahun ke 2 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, dari sebanyak 4 sasaran strategis dengan sebanyak 5 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100.00
2	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mencapai target	%	100	100	100.00
3	Kasus konflik antar/intra umat beragama	Kejadian	0	0	100.00
4	Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik	%	76,08	77,06	101.00
5	Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa	%	81,2	82	100.00

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	12,50 %
2	Sesuai Target	75.00 %
3	Tidak Mencapai Target	12,50 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 4 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	4	0	0.00	3	100.00	1	25.00

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
2	Misi 2	4	1	25.00	3	75.00	0	0.00
	Jumlah	8	1	12.50	6	75.00	1	12.50

Dari sebanyak 3 Tujuan, 4 sasaran dengan sebanyak 8 indikator kinerja, pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	4	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	3	75.00 %
3	Tidak Mencapai Target	1	25.00 %
B.	Misi 2	4	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	25.00 %
2	Sesuai Target	3	75.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.



Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak tahun 2021 - 2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Tujuan 1
Meningkatkan pelayanan publik Badan Kesbangpol
Sasaran 1
Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88,2	88,59	100.44	89,5	89,53	100.00
	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100.00	100	100	100.00

Sasaran Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.



Faktor yang menjadi pendorong tercapainya kinerja antara lain yaitu :

1. Tercukupinya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelayanan
2. Meningkatnya pemahaman petugas pelayanan

Sedangkan faktor penghambat tercapainya kinerja antara lain yaitu :

1. Masih perlunya peningkatan pemahaman petugas bidang pelayanan
2. Masih terbatasnya personil petugas bidang pelayanan, sehingga kurang maksimal

Program, kegiatan dan Sub kegiatan pendukung tercapainya kinerja indeks kepuasan masyarakat dan keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti yaitu sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 3.7
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Sasaran 1

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Tahun 2023		%
					Anggaran	Realisasi	
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100%	100%	780.498.900	666.450.099	85,39
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	65.500.000	62.455.000	95,35
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	257.521.000	244.535.175	94,96
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	6 Paket	6 Paket	289.224.000	230.502.000	79,70
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	100%	100%	11.500.000	10.803.224	93,94
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	4 Paket	4 Paket	127.053.900	118.154.700	93,00

Tabel 3.8
Efiseiensi dan Efektifitas Program Penunjang Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	% Capaian Kinerja keseluru han (≥100%)	% Penyer apan Anggar an	Tingkat Efisiensi (%)	Tingkat Efektifita s (%)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	85,39	11,23	112.66

Tujuan 2
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sasaran 2
Meningkatnya capaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya capaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai SAKIP Bakesbangpol	%	78,18	77,21	99,77	79,18	78,21	98,77
	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mencapai target	%	100	100	100.00	100	100	100.00

Sasaran Meningkatkan capaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mencapai target" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 2 Renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mencapai target" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.



Namun indikator Tujuan capaian kurang memenuhi target, hal ini dikarenakan masih kurang optimalnya hasil tindak lanjut rekomendasi yang diberikan.

Faktor yang menjadi pendorong tercapainya kinerja antara lain yaitu :

- 1. Keteladanan pemimpin dalam pencapaian target,
- 2. Semakin meningkatnya pemahaman SDM untuk pencapaian kinerja,
- 3. Sarana dan prasarana yang cukup

Sedangkan faktor penghambat tercapainya kinerja antara lain yaitu :

- 1. Masih kurangnya personil terutama pejabat truktural yang belum definitif.
- 2. Masih kurangnya pemahaman SDM tentang implementasi SAKIP

Dari faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja diatas maka inovasi yang dilakukan sebagai solusi antara lain

- 1. Mengoptimalkan potensi SDM yang tersedia untuk pencapaian target
- 2. Memberikan motivasi kepada seluruh SDM yang terlibat sehingga menjadi tim yang solid.

Untuk tercapainya kinerja Persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mencapai target didukung program dan kegiatan serta anggaran sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Tahun 2023		%
					Anggaran	Realisasi	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	100%	2.286.603.753	1.913.271.198	94,58%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	10	10 Dokumen	24.500.000	16.728.000	80,62%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	1	1 Laporan	2.262.103.753	1.896.543.198	96,96%

Tabel 3.10

Efiseiensi dan Efektifitas Program Penunjang Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	% Capaian Kinerja keseluruhan (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)	Tingkat Efektifitas (%)
----	---------	-------------------	---------	---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	% Capaian Kinerja keseluruhan (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)	Tingkat Efektifitas (%)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	85,39	3,21	103,32

Tujuan 3
Meningkatnya kondusifitas wilayah
Sasaran 3
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kerukunan antar umat beragama

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.11
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kerukunan antar umat beragama

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Angka Kejadian Konflik Sosial	Kejadian	0	0	100.00	0	0	100.00
	Kasus konflik antar/intra umat beragama	Kejadian	0	0	100.00	0	0	100.00

Sasaran Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kerukunan antar umat beragama dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Kasus konflik antar/intra umat beragama" adalah sebesar 0 dari target sebesar 0 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Kasus konflik antar/intra umat beragama" tahun ini adalah sebesar 100.00%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik maka capaian kinerjanya mencapai 100 %.

Capaian ini bisa kita ketahui bahwa sepanjang tahun 2023 ini wilayah Kabupaten Demak selalu dalam kondisi kondusif tidak ada konflik sosial baik berupa pertikaian antar warga, pertikaian antar pelajar dan terutama konflik antar umat beragama.



Faktor yang menjadi pendorong tercapainya kinerja antara lain yaitu :

- 1. Pemahaman masyarakat dalam beragama yang baik sehingga tumbuh saling menghormati dalam kehidupan beragama.
- 2. Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga kondusifitas kehidupan beragama.
- 3. Meningkatnya peran forum keagamaan dalam menjaga kerukunan umat beragama

Selain faktor pendorong pencapaian kinerja pada sasaran ini juga terdapat hal-hal yang menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja antara lain yaitu :

- 1. Memudarnya nilai-nilai luhur budaya bangsa akibat globalisasi yang tidak difilter dengan baik.
- 2. Semakin maraknya konten-konten intoleransi di media online yang mudah diakses
- 3. Kecenderungan masyarakat yang merasa paling benar dalam beragama.

Untuk tercapainya kinerja Persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mencapai target didukung program dan kegiatan serta anggaran sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Tahun 2023		%
					Anggaran	Realisasi	
1	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase masyarakat yang mengikuti pendidikan ketahanan yang paham terhadap Ketahanan Bangsa dan kerukunan umat beragama	80%	80%	649.627.000	638.606.000	98,30 %
	Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen laporan kegiatan bidang Ketahanan Bangsa dan Kerukunan Umat Beragama yang disusun	3	3 Dokumen	649.627.000	638.606.000	98,30 %

Tabel 3.12
Efiseiensi dan Efektifitas Program Penunjang Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	% Capaian Kinerja keseluruhan ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)	Tingkat Efektifitas (%)
1.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kerukunan antar umat beragama	Kasus konflik antar/intra umat beragama	Pemberdayaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	98,30	1,70	101,73

Tujuan 3
Meningkatnya kondusifitas wilayah
Sasaran 4
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan kesatuan bangsa

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.13
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan kesatuan bangsa

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik	%	74.5	75,3	101.00	76,08	77,06	101.00
2	Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa	%	79.3	80	100.00	81,2	82	100.00

Sasaran Meningkatkan Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan kesatuan bangsa dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik" adalah sebesar 77,06 dari target sebesar 76,08 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101.00 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik" tahun ini adalah sebesar 101.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik maka capaian kinerjanya mencapai 95.06 %.



Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa" adalah sebesar 82 dari target sebesar 81,2 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik maka capaian kinerjanya mencapai 95.35 %.

Pemahaman masyarakat dibidang Politik dan Kesatuan Bangsa penting untuk ditingkatkan, dengan pemahaman politik yang baik terutama etika politik diharapkan tidak ada gesekan dan meningkat pula partisipasi politik masyarakat dalam upaya pembangunan daerah.

Demikian pula peningkatan pemahaman masyarakat di bidang Kesatuan Bangsa, melalui penguatan ideologi Pancasila pada msyarakat, khususnya Faktor yang menjadi pendorong tercapainya kinerja antara lain yaitu :

1. Peningkatan kesadaran stakeholder dalam pengembangan wawasan kebangsaan cukup tinggi.
2. Adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat.
3. Peningkatan pokok pikiran legislatif upaya penguatan ideologi pancasila dan pendidikan politik

Selain faktor pendorong pencapaian pencapaian kinerja pada sasaran ini juga terdapat hal-hal yang menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja antara lian yaitu :

1. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat yang tidak dibarengi pengetahuan dan pendidikan berpengaruh terhadap pola pikirnya, mudah terpengaruh informasi yang tidak benar (hoax) dan tidak bisa mengetahui detail kebenaran informasi (hanya ikut-ikutan saja).
2. Memudarnya nilai-nilai luhur budaya bangsa akibat globalisasi yang tidak difilter dengan baik
3. Kecenderungan menurunnya karakter kebangsaan dan dan etika politik masyarakat terutama generasi muda.

Untuk tercapainya kinerja Persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mencapai target didukung program dan kegiatan serta anggaran sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Tahun 2023		%
					Anggaran	Realisasi	
1	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mengikuti peningkatan wawasan kebangsaan	80%	80%	2.024.218.000	1.798.053.910	88,83%



No	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Tahun 2023		%
					Anggaran	Realisasi	
		yang paham terhadap ideologi Pancasila, Bela Negara dan wawasan kebangsaan					
	Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah Dokumen Laporan Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan yang disusun	3	3 Dokumen	2.024.218.000	1.798.053.910	88,83%
2.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100 Persen	100 Persen	1.413.382.100	1.377.983.400	97,50%
	Perumusan Kebijakan teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan konflik sosial yang tertangani	12 Laporan	12 Laporan	1.413.382.100	1.377.983.400	97,50%
3.	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase masyarakat yang mengikuti pelatihan yang paham terhadap aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	77 Persen	77 Persen	26.181.993.700	26.042.020.573	99,47
	Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pementauan Situasi Politi	Jumlah Database Parpol dan Dokumen Kegiatan Pendidikan Politik masyarakat yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	26.181.993.700	26.042.020.573	99,47
4.	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	70 Persen	70 Persen	855.400.000	831.634.500	97,22
	Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Database Ormas dan Dokumen Laporan yang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi masyarakat yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	855.400.000	831.634.500	97,22



Tabel 3.12

Efiseiensi dan Efektifitas Program Penunjang Sasaran 4

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	% Capaian Kinerja keseluruhan (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)	Tingkat Efektifitas (%)
1.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan kesatuan bangsa	Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	88,83	1,90	101,92
			Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	100	97,50		
		Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100	99,47		
			Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100	97,22		

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2023 Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak menetapkan tujuan dengan indikator masing-masing sebanyak 3 dan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00%
- Tujuan 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 98.77%
- Tujuan 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00%
- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 101.27 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 tujuan dan 4 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, hanya 1 yang tidak mencapai 100.00%

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 33.852.160.700 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 33.268.019.680, dengan demikian dapat



dikatakan tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 584.141.020

Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak 2021 - 2026 menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 2 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2023, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00%
- Tujuan 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 98.77%
- Tujuan 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00%
- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 101.27 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 33.852.160.700 (tiga puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh dua juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak adalah 98.27 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Demak.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Demak.

Demak, 3 Januari 2024

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN DEMAK

KENDARSIH IRIANI, SH, MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19700708 199503 2 003